



Siaran Pers

Badan Kerja Sama
Antar-Parlemen (BKSAP)
DPR RI

Sekretariat:
Ged. Nusantara III, Lt. 2
Jl. Jend. Gatot Subroto Jakarta
10270 Indonesia

Website:
<http://ksap.dpr.go.id/>

Twitter:
[@bksapdpri](https://twitter.com/bksapdpri)

Instagram:
[@bksapdpri](https://www.instagram.com/bksapdpri)

YouTube:
[BKSAP DPR RI](https://www.youtube.com/BKSAP DPR RI)

BKSAP adalah Alat Kelengkapan Dewan yang dibentuk untuk menjadi ujung tombak Diplomasi Parlemen. BKSAP mempunyai fungsi untuk membina, mengembangkan, dan meningkatkan hubungan persahabatan dan kerja sama antara DPR dan parlemen negara lain, baik secara bilateral maupun multilateral, termasuk berbagai organisasi internasional yang menghimpun parlemen dan anggota parlemen. BKSAP juga menyampaikan saran atau rekomendasi kepada Pimpinan DPR terkait masalah kerja sama antar-parlemen.

Informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Biro KSAP:
021-5715814
biro_ksap@dpr.go.id

Tegas! DPR minta Parlemen Asia Tagih Janji Pembiayaan Iklim Dari Negara Maju

Manama, Bahrain (9/12/2024) – Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, tegas mendorong soliditas parlemen negara-negara Asia dalam menagih janji pembiayaan iklim yang sudah disepakati oleh negara maju. Upaya tersebut perlu dilakukan mengingat selama ini komitmen pendanaan iklim negara maju belum terwujud menyeluruh.

Di sisi lain, negara berkembang dan tertinggal menjadi pihak yang paling terdampak perubahan iklim baik dari sisi kapasitas pembangunan hingga situasi bencana. “Pendekatan prinsip common but differentiated responsibilities with respective capabilities dalam implementasi Paris Agreement itu perlu ditunjukkan dengan kepemimpinan dan komitmen pembiayaan iklim dari negara maju. Dan ini adalah sebuah keharusan,” tegas Ketua Delegasi BKSAP DPR RI Dr. Mardani Ali Sera dalam pertemuan Parlemen negara Asia (Asian Parliamentary Assembly/APA) Standing Committee on Sustainable Development, 7-9 Desember 2024 di Manama, Bahrain.

Delegasi DPR RI bersama parlemen dari 15 negara lainnya bertemu di Bahrain untuk mendiskusikan beragam isu pembangunan berkelanjutan dengan sejumlah resolusi yang fokus pada isu energi, perubahan iklim, hingga lingkungan. DPR pada kesempatan ini diwakili Delegasi dari BKSAP yang terdiri dari Mardani Ali Sera (Ketua Delegasi/Ketua BKSAP/FPKS), Ravindra Airlangga (Anggota Delegasi/Wakil Ketua BKSAP/F-Partai Golkar), Stevano Adranacus (Anggota Delegasi/Anggota BKSAP/F-PDIP), dan Galih Dimuntur Kartasasmita (Anggota Delegasi/Anggota BKSAP/F-Partai Golkar).

Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mengusulkan penegasan komitmen pembiayaan iklim dari negara maju untuk negara berkembang dan tertinggal yang kembali dijanjikan meningkat hingga US\$ 300 miliar pertahun dari sebelumnya US\$ 100 miliar per tahun pada 2035. Hasil keluaran COP ke-29 di Baku Azerbaijan yakni Baku Climate Unity Pact perlu disambut oleh APA dan menjadi bagian resolusi isu lingkungan (Resolution on Environmental Issues). “Dokumen kesepakatan Konferensi Negara Pihak UNFCCC ke-29 perlu dipahami oleh parlemen negara-negara Asia yang bergabung di APA. Sehingga kita dapat persisten dan berkelanjutan mendesak peran terdepan negara maju dalam menangani dampak perubahan iklim,” usulnya.

Dalam resolusi isu lingkungan, Mardani menambahkan ada banyak hal yang memerlukan peran terdepan dan kepemimpinan dari negara maju. Terlebih hal-hal tersebut telah termaktub dalam Perjanjian Paris. “Sebagai contoh adalah terkait gaya hidup berkelanjutan dan pola berkelanjutan dari konsumsi dan produksi yang menurut Perjanjian Paris pelaksanaannya perlu mendapatkan contoh dari negara maju,” sarannya dalam resolusi dimaksud.

DPR RI menyoroti tiga hal dalam pembahasan resolusi isu lingkungan di APA. Ketiga hal tersebut adalah komitmen negara maju dalam pembiayaan iklim, perlunya upaya untuk memberi contoh (lead by example) serta perlunya integrasi demokrasi lingkungan hidup yang merupakan bagian dari Prinsip 10 Deklarasi Rio dalam proses legislasi dan kebijakan.

UNEP Adaptation Gap Report 2023 mencatat berdasarkan kebutuhan, estimasi dana yang diperlukan untuk adaptasi berada di kisaran US\$ 215 miliar hingga US\$ 387 miliar per tahun. Namun, data menemukan sekira rentang US\$ 194 – US\$ 366 miliar per tahun merupakan catatan kesenjangan pembiayaan iklim khususnya adaptasi. (BKSAP)

(*****)